

PENGELOMPOKAN KOMODITI BAHAN PANGAN POKOK DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

Classification of Staple Food Commodity Using Analytical Hierarchy Process

Dwi Wahyuniarti Prabowo

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan - RI,
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat
dwi_wp@yahoo.com

Naskah diterima: 9/10/2013, Direvisi:12/2/2014, Disetujui diterbitkan: 25/11/2014

Abstrak

Pemerintah sampai saat ini belum memiliki daftar komoditi bahan pangan pokok (Bapok) yang konsisten. Terdapat perbedaan pandangan tentang komoditi Bapok antar lembaga pemerintah, misalnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep-28/M.EKON/05/2010 dan Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014 memasukkan komoditi Bapok yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk mencari kriteria penentuan suatu komoditi untuk dikategorikan sebagai Bapok dan mengusulkan komoditi-komoditi potensial untuk Bapok dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Hasil temuan menyimpulkan enam kriteria penentu komoditas sebagai Bapok yaitu pangsa pengeluaran komoditi dalam pengeluaran pangan rumah tangga; kontribusi kandungan komoditi terhadap karbohidrat; konsumsi terhadap protein; frekuensi konsumsi; kontribusi konsumsi komoditi terhadap vitamin dan mineral; serta pangsa produksi domestik terhadap konsumsi. Berdasarkan kriteria tersebut, calon Bapok yang diusulkan adalah beras, telur ayam ras, kedelai (tahu dan tempe), daging ayam ras, ikan kembung segar, ikan bandeng segar, gula pasir, susu, minyak goreng, dan terigu.

Kata Kunci: Pangan Pokok, Kriteria Bahan Pangan Pokok, Analytical Hierarchy Process

Abstract

The government still does not have consistent list of commodities that classified as staple food. There is a difference view on the staple foods among government institutions. The Economic Coordinating Ministry's decision letter No. Kep-28/M.EKON/05/2010 and The Ministry of Trade Strategic Plan 2010-2014 for example, listed different kind of staple foods. The aim of this paper is to identify the criteria of commodity which can be classified as staple food and to identify potential commodities that can be included as staple food by using Analytical Hierarchy Process. Six criteria of staple food are expenditure share of food in household spending; contribution to carbohydrate; consumption of the protein; frequency of consumption; contribution to vitamins and minerals; as well as the share of domestic production to consumption. Based on these criterias, the candidates of proposed staple foods are rice, eggs, tofu and tempe, chicken meat, fresh mackerel, fresh milk, fish, sugar, milk, cooking oil, and wheat flour.

Keywords: Staple Food, Staple Food Criteria, Analytical Hierarchy Process

JEL Classification: D01, D10, E64

PENDAHULUAN

Bahan pangan pokok memegang peranan penting dalam aspek ekonomi, sosial, bahkan politik; namun sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki daftar komoditi bahan pangan pokok (Bapok) yang konsisten. Sebagai contoh, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 115/MPP/KEP/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat (Depperindag, 1998), yang dimasukkan sebagai barang kebutuhan pokok adalah beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep-28/M.EKON/05/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok (Menko Perekonomian, 2010) yang termasuk Bapok adalah beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, khususnya mengenai ketidakkonsistenan dalam penentuan komoditi-komoditi Bapok; dan kemungkinan masuknya komoditi-komoditi lain sebagai bahan pangan pokok.

Undang-Undang (UU) Pangan No 18 Tahun 2012 (Setneg, 2013) menegaskan pentingnya pengelompokan komoditi dapat dikategorikan sebagai Bapok yang dalam UU pangan disebut pangan pokok.

UU tersebut mendefinisikan pangan pokok sebagai pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Selain itu, Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah pada pasal 28 ayat (1). Namun demikian, UU pangan ini belum secara jelas menyebutkan komoditi-komoditi pangan yang termasuk pangan pokok.

Pada sisi lain, jenis komoditi Bapok diduga mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Kondisi sosial-ekonomi tersebut diantaranya peningkatan taraf hidup dan pendapatan serta berkembangnya populasi penduduk kelas menengah. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi keputusan pilihan pangan saat ini adalah ketersediaan komoditi yang dikonsumsi dan keterjangkauannya. Peningkatan permintaan pangan karena pertumbuhan populasi, peningkatan konversi produk pangan menjadi bahan baku energi, dan perubahan stok karena faktor cuaca merupakan masalah dalam ketersediaan pangan saat ini (Spiertz and Ewert, 2009). Perubahan persepsi konsumen terhadap inovasi juga mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap pangan (Cornescu and Adam, 2013). Sebagai contoh, produk-produk olahan pangan dari gandum saat ini banyak dikonsumsi masyarakat dan tingkat konsumsinya terus meningkat.

Hal ini menunjukkan penerimaan konsumen atas inovasi.

Analisis dilakukan dalam upaya untuk mencari kriteria-kriteria dalam menentukan suatu komoditi yang dapat dikategorikan sebagai Bapok. Kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk memilih komoditi yang dapat dikategorikan sebagai Bapok. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah berupa komoditi-komoditi potensial untuk Bapok.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pangan Pokok

Kebutuhan paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa adalah pangan. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, diperlukan dalam mencapai ketahanan pangan. Faktor lain yang merupakan faktor penting dalam mencapai ketahanan pangan adalah tersedianya dan terdistribusinya pangan yang terjangkau dari sisi harga dan aman dikonsumsi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi dalam aktivitas sehari-hari (Saliem et al, 2002). Pangan dinilai penting (Nurkhayani, 2009) karena kenaikan harga pangan dapat menyebabkan penurunan konsumsi kalori dan protein yang besar.

Pengertian pangan menurut Encyclopaedia Britannica (2013) adalah “material consisting essentially of protein, carbohydrate, and fat used in the body of an organism to sustain growth, repair,

and vital processes and to furnish energy”. Definisi tersebut menekankan kepada kandungan bahan pangan yang memberikan manfaat kepada tubuh dalam pertumbuhan, memperbaiki kerusakan, dan menjaga kelancaran fungsi vital serta sebagai sumber energi.

Dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Setneg, 1996), pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan definisi pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Setneg, 2002) adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan atas asas: (a) kedaulatan; (b) kemandirian; (c) ketahanan; (d). keamanan; (e) manfaat; (f). pemerataan; (g) berkelanjutan; dan (h) keadilan.

Dalam UU Pangan yang baru yaitu UU No. 18 Tahun 2012 (Setneg, 2012) tentang Pangan, pengertian pangan lebih diperluas terutama ruang lingkup jenis pangannya. Dalam UU Pangan tersebut, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Penentuan jenis pangan yang dikonsumsi sangat tergantung kepada beberapa faktor, di antaranya jenis tanaman penghasil bahan pangan pokok yang biasa ditanam di daerah serta tradisi yang diwariskan oleh budaya setempat. Perilaku konsumsi pangan masyarakat dilandasi oleh kebiasaan makan (food habit) yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga melalui proses sosialisasi. Kebiasaan makan tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan ekologi (ciri tanaman pangan, ternak dan ikan yang tersedia dan dapat dibudidayakan setempat), lingkungan budaya dan sistem ekonomi (Hidayah, 2011).

Undang-Undang (UU) tentang pangan sebelumnya, yaitu UU No. 7 Tahun 1996, belum memasukkan

definisi pangan pokok dalam uraian pasalnya. Pada UU tentang pangan terbaru, yaitu UU No. 18 Tahun 2012, pangan pokok didefinisikan secara eksplisit. Pangan Pokok berdasarkan UU ini adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

FAO (2010) mendefinisikan pangan pokok sebagai pangan yang dikonsumsi secara rutin pada kuantitas tertentu yang menjadi bagian dominan dalam pola makan dan merupakan sumber asupan energi dan gizi utama yang dibutuhkan. Pangan pokok memang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi karena tubuh membutuhkan variasi pangan lain (Ariani, 2010).

Pengelompokan Bahan Pangan Pokok

Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 (Kementerian Pertanian, 2010) mengelompokkan komoditas pangan penting ke dalam dua kelompok yaitu pangan nabati dan pangan hewani. Pangan nabati terdiri dari 10 komoditi yang terdiri dari beras, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayuran, buah-buahan, minyak goreng dan gula putih. Sedangkan pangan hewani terdiri dari lima komoditi yang meliputi daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur, susu, dan ikan.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2011) membagi bahan pangan ke dalam sembilan kelompok yang meliputi (1)

padi-padian (beras, jagung, terigu), (2) umbi-umbian (singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lainnya),(3) pangan hewani (daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan), (4) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak sawit, minyak lainnya), (5) buah/biji berminyak (kelapa, kemiri), (6) kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang lain), (7) gula (gula pasir, gula merah, (8) sayuran dan buah (sayur, buah), (9) lain-lain (minuman, bumbu-bumbuan).

Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 115/MPP/KEP/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Masyarakat mengklasifikasikan bahan pangan sebagai beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur

ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menko Perekonomian No. Kep-28/M.EKON/05/2010 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok, Bapok meliputi beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010-2014 (Kementerian Perdagangan, 2010) juga mengelompokkan komoditi pangan sebagai indikator kinerja stabilisasi harga. Pengelompokan pangan pokok berdasarkan beberapa kebijakan yang diperlihatkan pada Tabel 1 menunjukkan beberapa komoditi yang konsisten dikelompokkan sebagai pangan pokok yaitu beras, minyak goreng, gula, daging sapi, daging ayam, dan telur.

Tabel 1. Komoditi Pangan Pokok

	Renstra BKP 2010-2014	SK Menperindag No. 155/1998	SK Menko No. 28/2010	Renstra Kemendag 2010-2014
Beras	v	v	v	v
Jagung	v	v		v
Kedelai	v		v	
Kacang Tanah	v			
Ubi Kayu	v			
Ubi Jalar	v			
Sayuran	v			
Buah-buahan	v			
Minyak Goreng	v	v	v	v
Gula	v	v	v	v
Daging Sapi	v	v	v	v
Daging Kerbau	v			
Daging Ayam	v	v	v	v
Telur	v	v	v	v
Susu	v	v		v
Ikan	v			
Mentega		v		
Minyak Tanah		v		
Garam Beriodium		v		
Tepung Terigu			v	v

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat Indonesia saat ini, diperkirakan telah terjadi pergeseran kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat. Sebagai contoh, produk-produk perikanan seperti ikan kembung dan ikan bandeng yang selama ini kurang diperhatikan juga diperkirakan mengalami peningkatan konsumsi. Oleh karena itu perlu ditegaskan kembali jenis-jenis barang yang dapat dikategorikan sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat, dalam hal ini lebih khusus pada bahan pangan pokok. Penelitian yang dilakukan Yuliana (2008) menyimpulkan semua kelompok pangan merupakan barang pangan jika dilihat dari elastisitas pendapatan, dimana kelompok sumber protein merupakan substitusi dari kelompok sumber karbohidrat.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Salah satu metode untuk melakukan pengelompokan adalah metode Analytical Hierarchical Process (AHP), yaitu suatu metode untuk menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria (multi criteria) (Teknomo, Siswanto, Yudhanto, 1999). AHP mempunyai sifat multi kriteria dalam penyusunan kriteria, sehingga AHP cukup banyak digunakan dalam penelitian. AHP didasarkan pada tiga prinsip logika analisis yaitu membangun hirarki, membangun prioritas,

dan konsisten secara logika (Meziani dan Rezvani, 1990).

Di samping bersifat multi kriteria, AHP juga didasarkan pada suatu proses pemilihan yang terstruktur dan logis. Pemilihan atau penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu prosedur yang dapat merepresentasi pendapat dari narasumber yang kompeten (Bourgeois, 2005).

Dalam penelitian ini, tahapan AHP dilakukan untuk menyeleksi komoditi yang dapat diusulkan sebagai Bapok. Untuk itu, uraian analisis akan difokuskan pada: (a) dekomposisi dari masalah pemilihan Bapok; (b) teknik penilaian untuk membandingkan elemen-elemen hasil dekomposisi; dan (c) sintesis dari penilaian.

1. Dekomposisi Masalah

Sesuai dengan tujuan penelitian (goal), maka tujuan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi atau menyusun prioritas yang dapat digunakan sebagai kriteria Bapok. Setelah tujuan dapat ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria dari tujuan tersebut. Untuk memperoleh kriteria-kriteria tentang Bapok, maka dilakukan identifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang ahli-ahli. Responden dalam FGD terdiri dari 15 (lima belas) orang yang mewakili akademisi, ahli pangan, ahli ekonomi, ahli pertanian, dan ahli perikanan. Untuk membuat proses AHP menjadi dapat dikelola (managable), maka kriteria

dibatasi. Dalam hal ini, kriteria yang digunakan adalah kriteria yang diturunkan dari pengertian/definisi Bapok seperti yang tercantum dalam UU Pangan. Dari FGD ini diperoleh hasil mengenai sejumlah “m” kriteria penentuan Bapok dan sekitar 190 komoditi Bapok.

2. Teknik Penilaian

Setelah dapat ditentukan sebanyak “m” kriteria melalui FGD, maka tahap selanjutnya adalah menilai atau membandingkan derajat kepentingan (bobot) dari masing-masing kriteria untuk identifikasi bahan pangan pokok. Dengan

kata lain, perbandingan antar kriteria dimaksudkan untuk menentukan bobot untuk masing-masing kriteria.

Alternatif penilaian yang digunakan oleh Bourgeois (2005) menggunakan skala antara 0,2 sampai dengan 1,8 untuk menyatakan perbandingan antar kriteria (lihat Tabel 2). Jika kriteria A sedikit lebih baik/disukai dari kriteria B, maka A diberi nilai 1,2 dan B dinilai 0,8, yang mengindikasikan jarak sekitar 20% dari nilai 1. Jika kriteria A jauh lebih disukai dari kriteria B, maka A diberi nilai 1,4 dan B 0,6.

Tabel 2. Skala Penilaian

Hasil Penilaian	Nilai A	Nilai B
A jauh lebih disukai dari B	1,4	0,6
A sedikit lebih disukai dari B	1,2	0,8
A sama dengan B	1,0	1,0
A sedikit kurang disukai dari B	0,8	1,2
A jauh kurang disukai dari B	0,6	1,4

Sumber: Bourgeois (2005)

Dengan menggunakan penilaian seperti Tabel 2 dan misalnya hanya ada empat kriteria, maka perbandingan antar kriteria akan menghasilkan Tabel 3. Dari tabel tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

a. c_{ij} merupakan hasil penilaian/perbandingan antara kriteria i dengan j ;

b. c_i merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki kriteria ke i ;

c. c merupakan penjumlahan semua nilai c_i ;

d. Bobot kriteria ke i diperoleh dengan membagi nilai c_i dengan c .

Tabel 3. Perbandingan antar Kriteria

Kriteria	CR ₁	CR ₂	CR ₃	CR ₄	Jumlah	Bobot
CR ₁	-	C ₁₂	C ₁₃	C ₁₄	C _{1.}	bc ₁ =c _{1./c}
CR ₂	C ₂₁	-	C ₂₃	C ₂₄	C _{2.}	bc ₂ =c _{2./c}
CR ₃	C ₃₁	C ₃₂	-	C ₃₄	C _{3.}	bc ₃ =c _{3./c}
CR ₄	C ₄₁	C ₄₂	C ₄₃	-	C _{4.}	bc ₄ =c _{4./c}
Jumlah					C	

Dengan menggunakan kriteria pendahuluan tersebut, maka akan diperoleh sebesar “n” pangan yang akan diseleksi berdasarkan “m” kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu, “n” komoditi tersebut dinilai berdasarkan satu persatu dari “m” kriteria. Tabel 4 mengilustrasikan perbandingan antar pilihan (empat pilihan) untuk kriteria satu (C1) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. o_{ij} merupakan hasil penilaian/ perbandingan antara pilihan i dengan k untuk kriteria ke j
- b. o_i merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki pilihan ke i
- c. o merupakan penjumlahan semua nilai o_i.
- d. bo_{ij} merupakan nilai pilihan ke i untuk kriteria ke j

Tabel 4. Perbandingan antar Pilihan untuk Kriteria C₁

C ₁	OP ₁	OP ₂	OP ₃	OP ₄	Jumlah	Bobot
OP ₁	-	O ₁₂	O ₁₃	O ₁₄	O _{1.}	bo ₁₁ =O _{1./o}
OP ₂	O ₂₁	-	O ₂₃	O ₂₄	O _{2.}	bo ₂₁ =O _{2./o}
OP ₃	O ₃₁	O ₃₂	-	O ₃₄	O _{3.}	bo ₃₁ =O _{3./o}
OP ₄	O ₄₁	O ₄₂	O ₄₃	-	O _{4.}	bo ₄₁ =O _{4./o}
Jumlah					O	

3. Sintesis Penilaian

Sintesis hasil penilaian merupakan tahap akhir dari AHP (Bayazit dan Karpak, 2005). Pada dasarnya, sintesis ini adalah merupakan penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap pilihan pada masing-masing kriteria setelah diberi bobot dari

kriteria tersebut. Secara umum, nilai suatu pilihan adalah sebagai berikut:

$$bop_i = \sum_{i=1}^n bo_{ij} * bc_j \dots\dots\dots(1)$$

bo_{ij} : nilai/ bobot untuk pilihan ke i

Sebagai contoh nilai prioritas/bobot pilihan 1 (OP1) diperoleh dengan mengalikan nilai bobot pada kriteria dengan nilai yang terkait dengan kriteria tersebut untuk pilihan 1 sebagai berikut:

$$bop_i = bo_{11} * bc_1 + bo_{12} * bc_2 + bo_{13} * bc_3 + bo_{14} * bc_4 \dots \dots \dots (2)$$

Hal yang identik dilakukan untuk pilihan 2, 3 dan 4. Dengan membandingkan nilai yang diperoleh masing-masing pilihan, prioritas dapat disusun berdasarkan besarnya nilai tersebut. Semakin tinggi nilai suatu pilihan, semakin tinggi prioritasnya, dan sebaliknya (Permadi, 1992).

Tabel 5. Sintesa Penilaian

	CR1	CR2	CR3	CR4	Prioritas
	bc ₁	bc ₂	bc ₃	bc ₄	bop _i
OP ₁	bo ₁₁	bo ₁₂	bo ₁₃	bo ₁₄	bop ₁
OP ₂	bo ₂₁	bo ₂₂	bo ₂₃	bo ₂₃	bop ₂
OP ₃	bo ₃₁	bo ₃₂	bo ₃₃	bo ₃₄	bop ₃
OP ₄	bo ₄₁	bo ₄₂	bo ₄₃	bo ₄₄	bop ₄

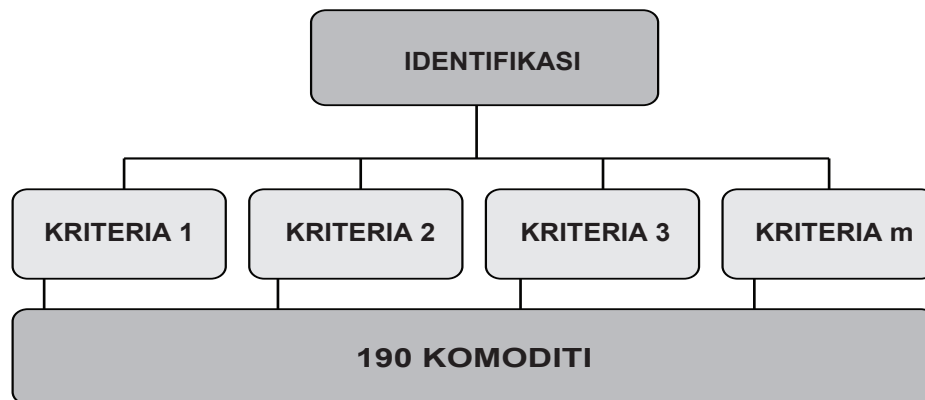
Langkah pertama sebelum dilakukan AHP adalah menentukan pilihan komoditi yang potensial menjadi Bapok (Gambar 1). Berdasarkan data SUSENAS 2012 (BPS, 2012), maka ada sekitar 190 pangan atau bahan pangan, termasuk minuman, yang menjadi konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan AHP, calon Bapok tersebut diseleksi terlebih dahulu dengan kriteria pendahuluan sebagai berikut:

- a. Dalam pengeluaran rumah tangga, pangan minimal berkontribusi sebesar 0,5% dari total pengeluaran rumah tangga. Penentuan besaran kontribusi didasarkan pada nilai tengah dari data kontribusi pengeluaran rumah tangga

- komoditi pangan pada Susenas. Makanan utama direpresentasikan oleh kriteria pangsa pengeluaran dalam pengeluaran pangan rumah tangga dalam bentuk persentase. Jika suatu komoditi terpilih sebagai Bapok, maka pangsa pengeluaran dalam pengeluaran pangan seyogyanya cukup signifikan. Dalam studi ini, agar masuk sebagai calon Bapok, maka pangsa pengeluaran tersebut minimal 0,5% terhadap total pengeluaran pangan rumah tangga.
- b. Dari segi gizi, pangan minimal berkontribusi terhadap kebutuhan dasar yang antara lain karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk menentukan kriteria-kriteria yang digunakan dalam mengelompokkan bahan pangan pokok seperti yang terlihat pada Tabel 6. Kriteria-kriteria tersebut terutama diturunkan dari pengertian/definisi

bahan pangan pokok seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Pangan No.18 Tahun 2012 yang berbunyi: “pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal”



Gambar 1. Dekomposisi Masalah Penentuan Bapok.

Pengertian bahan pangan pokok sebagai makanan utama sehari-hari direpresentasikan oleh kriteria frekuensi mengkonsumsi dimana komoditi yang termasuk Bapok dikonsumsi cukup sering oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dengan kata lain, suatu komoditi termasuk Bapok seyogyanya adalah makanan utama yang dikonsumsi cukup sering dengan frekuensi paling tidak seminggu sekali oleh kebanyakan penduduk Indonesia.

Dari segi gizi masyarakat, suatu komoditi sebagai makanan pokok maka hendaknya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebutuhan gizi.

Tiga kriteria yang berkaitan dengan gizi adalah sumbangan suatu komoditi terhadap (i) karbohidrat; (ii) protein, dan (iii) vitamin dan mineral. Suatu komoditi dianggap sebagai Bapok jika memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap ketiga komponen gizi tersebut. Buruknya gizi merupakan masalah yang banyak terjadi di negara berkembang. Gizi dan nutrisi yang tidak mencukupi di masa pertumbuhan menjadi salah satu penyebab kematian anak dan memberikan konsekuensi jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas (Stillman and Thomas, 2008).

Tabel 6. Kriteria untuk Menyeleksi Komoditi Bapok

Kriteria	Definisi	Representasi Pengertian Bapok
1. Gizi		
- Karbohidrat/Kalori	Kontribusi karbohidrat terhadap total per kapita	Makanan utama
- Protein	Kontribusi protein terhadap total per kapita	Makanan utama
- Vitamin dan mineral	Kontribusi vitamin dan mineral terhadap total per kapita	Makanan utama
2. Ekonomi Rumah Tangga		
- Pangsa Pengeluaran pangan Rumah Tangga (PPRT)	Persentase pengeluaran rumah tangga untuk pangan tersebut per satuan waktu	Makanan utama
- Frekuensi konsumsi	Frekuensi mengkonsumsi per bulan atau per minggu	Sehari-hari
3. Produksi		
- Pangsa produksi dalam negeri	Persentase produksi dalam negeri/lokal terhadap konsumsi (<i>index dependency ratio</i>)	Sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal

Pengertian sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal diwakili oleh kriteria pangsa produksi dalam negeri terhadap konsumsi dalam negeri. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal bermakna bahwa bahan pangan tersebut sesuai dengan agro-klimat dan sosial budaya masyarakat. Implikasi dari kesesuaian tersebut adalah bahwa komoditas tersebut seyogyanya diproduksi cukup banyak di dalam negeri sehingga memiliki pangsa produksi yang besar terhadap kebutuhan dalam negeri.

Pangan tidak hanya cocok secara agroklimat, sosial, dan budaya, namun juga dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Penilaian didasarkan pada data indikator pangsa produksi dalam negeri terhadap konsumsi dalam negeri (*Index Dependency Ratio : IDR*) sebagai indikator kesesuaian dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Semakin besar nilai IDR maka ketidaksesuaian dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal semakin besar.

Tabel 7. Index Dependency Ratio Produk Pangan Indonesia

Komoditi	Tahun				
	2008	2009	2010	2012	2013*
Beras	1,2	1,0	2,3	4,5	3,9
Daging Sapi	10,4	14,2	17,2	12,2	8,4
Kedelai	60,1	57,4	65,8	71,1	46,5
Gula	34,4	51,3	52,3	60,3	72,3

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian, diolah (2013)

Keterangan: Produksi Beras, gula dan daging sapi tahun 2013 masih estimasi dan Produksi kedelai (ASEM)

Berdasarkan data SUSENAS 2009-2011 (BPS, 2011), ada sebanyak 190 komoditas/produk yang dikonsumsi rumah tangga. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 133 komoditas yang termasuk kategori bahan pangan. Seleksi tahap pertama dengan menggunakan kriteria

minimal berkontribusi 0,5% terhadap total pengeluaran rumah tangga dan menggabungkan komoditas yang identik, seperti kedelai (tahu dan tempe). Dengan pendekatan tersebut, maka terpilih dua puluh komoditas calon Bapok seperti tercantum pada Tabel 8.

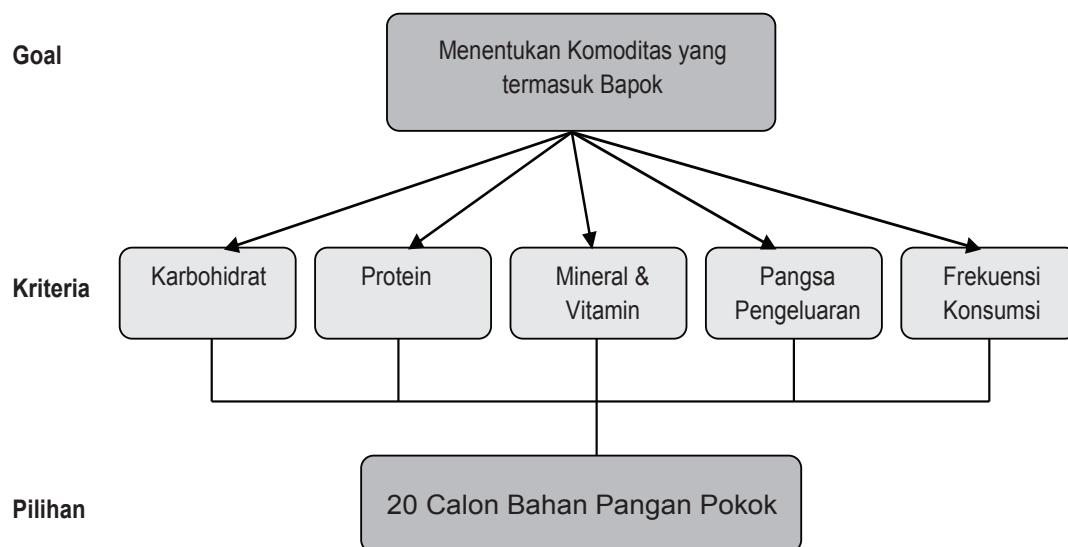
Tabel 8. Daftar Komoditas Calon Bapok

No	Komoditas (SUSENAS)	Rata-rata		
		Kota	Desa	K + D
1	Beras (Beras Lokal, Kualitas Unggul, Impor)	13,31	21,36	16,88
2	Terigu	6,52	5,42	5,63
3	Minyak Goreng	2,90	3,44	3,19
4	Kedelai (Tahu & Tempe)	2,62	2,62	2,62
5	Telur Ayam Ras	2,39	2,29	2,35
6	Gula Pasir	1,87	2,84	2,30
7	Daging Ayam Ras	2,77	1,66	2,23
8	Susu	2,73	1,21	2,05
9	Cabe merah & rawit	1,31	1,84	1,55
10	Bawang Merah	0,89	1,25	1,05
11	Jeruk	1,24	0,79	1,04
12	Tongkol/Tuna/Cakalang Segar	0,77	1,09	0,91
13	Daging Sapi	1,02	0,42	0,76
14	Kembung Segar	0,81	0,66	0,74
15	Teri Diawetkan	0,44	0,72	0,56
16	Mujair	0,54	0,58	0,56
17	Bandeng Segar	0,53	0,58	0,55
18	Bawang Putih	0,49	0,63	0,55
19	Kelapa	0,39	0,69	0,52
20	Ikan Mas	0,50	0,50	0,50

Sumber : BPS (2011), diolah

Dua puluh komoditi calon Bapok tersebut kemudian akan dinilai dan diperingkat berdasarkan masing-masing kriteria pengelompokan Bapok yaitu pangsa pengeluaran komoditi dalam pengeluaran pangan rumah tangga; kontribusi kandungan komoditi terhadap karbohidrat; konsumsi terhadap protein; frekuensi konsumsi; kontribusi konsumsi komoditi terhadap vitamin dan mineral; serta pangsa produksi domestik terhadap

konsumsi. Sepuluh komoditi pada peringkat teratas dipilih sebagai komoditi yang akan diusulkan sebagai Bapok. Pemilihan banyaknya sepuluh komoditi didasarkan pendapat para ahli dan tingkat kemampuan Pemerintah dalam mengendalikan dan mengawasi Bapok. Berdasarkan kriteria dan calon Bapok, maka secara sederhana dekomposisi masalah dengan model AHP sebagaimana terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Dekomposisi Masalah dalam Penentuan Bapok.

Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data sekunder yang digunakan adalah data komoditi pangan dan pangsa pengeluaran rumah tangga. Sumber data sekunder utama berasal dari data SUSENAS dari Badan Pusat Statistik. Data SUSENAS yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata tahun 2009, 2010, dan 2011.
2. Data primer digunakan secara umum adalah data yang berkaitan dengan informasi kriteria Bapok dan penilaiannya, yang digunakan baik untuk kriteria Bapok maupun untuk penilaian komoditi berdasarkan kriteria. Data primer ini diperoleh melalui FGD untuk penentuan kriteria dan pengisian kuesioner penilaian untuk penentuan komoditi yang akan diusulkan sebagai Bapok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penilaian Kriteria dan Komoditas

Kriteria penentu komoditas sebagai Bapok terutama diturunkan dari pengertian/definisi bahan pangan pokok seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Pangan No.18 Tahun 2012 yang mencakup tiga isu utama yaitu gizi, ekonomi rumah tangga, dan produksi. Terdapat 6 (enam) kriteria penentu komoditas sebagai Bapok yaitu pangsa pengeluaran komoditi dalam pengeluaran pangan rumah tangga; kontribusi kandungan komoditi terhadap karbohidrat; konsumsi terhadap protein; frekuensi konsumsi; kontribusi konsumsi komoditi terhadap vitamin dan mineral; serta pangsa produksi domestik terhadap konsumsi.

Hasil penilaian menunjukkan kriteria pangsa pengeluaran rumah tangga memiliki bobot terbesar dengan nilai 0,217

diikuti oleh kriteria kontribusi terhadap karbohidrat yang sedikit lebih kecil yaitu 0,194 (Tabel 9.). Hal ini berarti bahwa kedua kriteria tersebut berperan paling penting dalam menentukan suatu komoditas untuk dapat dikategorikan sebagai Bapok dengan pangsa lebih dari 41%. Tiga kriteria berikutnya dengan bobot sekitar 0,15 berturut turut adalah kontribusi terhadap protein, frekuensi dikonsumsi, dan kontribusi terhadap vitamin. Kriteria produksi menempati peringkat terendah dengan nilai 0,128.

Kriteria pangsa pengeluaran rumah tangga unggul atas empat kriteria lainnya

bermakna bahwa kriteria terpenting dari suatu komoditas dikategorikan sebagai Bapok adalah pangsa pengeluaran rumah tangga. Kontribusi karbohidrat terhadap konsumsi per kapita menempati urutan ke dua yang menggambarkan bahwa karbohidrat sebagai sumber kalori utama masih dinilai sebagai indikator penting suatu komoditas dikategorikan sebagai Bapok. Keadaan ini sejalan dengan komposisi masyarakat Indonesia yang masih didominasi masyarakat menengah ke bawah dengan pangsa sekitar 70% dari populasi penduduk Indonesia.

Tabel 9. Hasil Penilaian Kriteria Bapok

Kriteria	Karbohidrat	Protein	Vitamin	Pengeluaran	Frekuensi	Produksi	Total	Bobot	Ranking
Karbohidrat	1,0	1,2	1,4	0,8	1,2	1,4	7,00	0,194	2
Protein	0,8	1,0	1,2	0,6	1,0	1,2	5,80	0,161	3
Vitamin	0,6	0,8	1,0	0,6	1,0	1,2	5,20	0,144	5
Pengeluaran	1,2	1,4	1,4	1,0	1,4	1,4	7,80	0,217	1
Frekuensi	0,8	1,0	1,0	0,6	1,0	1,2	5,60	0,156	4
Produksi	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	1,0	4,60	0,128	6
Total							36,00	1,000	

Sumber: Hasil Olahan (2013)

Kriteria kontribusi terhadap protein, frekuensi dikonsumsi, dan kontribusi terhadap vitamin dan mineral dapat dinilai sebagai lapis kedua dalam menentukan apakah suatu komoditas dapat dikategorikan sebagai Bapok. Kriteria ini cukup penting, namun perannya dibawah pangsa pengeluaran rumah tangga dan kontribusi terhadap karbohidrat. Kriteria produksi yang mencerminkan ketergantungan terhadap impor memiliki bobot

terkecil. Kriteria produksi dinilai agak lemah kaitannya dengan Bapok karena dinilai lebih penting dikaitkan dengan kebijakan yang seyogyanya diterapkan pemerintah, bukan untuk menentukan suatu komoditi Bapok, karena Bapok berkaitan dengan konsumsi.

Kriteria karbohidrat menempatkan beras sebagai komoditi dengan penilaian tertinggi dengan bobot 0,012 diikuti oleh terigu dengan bobot yang hampir sama

(Tabel 10). Hasil ini sejalan dengan persepsi masyarakat secara umum yang menempatkan beras sebagai bahan kalori utama dan menempatkan beras sebagai Bapak. Data SUSENAS (2009-2011) mengindikasikan kontribusi beras terhadap karbohidrat mencapai rata-rata sekitar 76,35%. Terigu dan berbagai produk turunannya menempati urutan kedua sebagai sumber karbohidrat. Pentingnya beras juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Murda (2009) yang menyatakan bahwa pengaruh harga beras terhadap permintaan seluruh kelompok pangan lebih besar dari pada pengaruh harga-harga bukan beras terhadap permintaan beras.

Dengan menggunakan kriteria protein, maka ada dua kelompok besar yang masuk 10 besar penyumbang protein. Kelompok pertama dengan bobot sekitar 0,010 secara berurut adalah susu, ikan kembung segar, daging sapi, ikan mujair dan ikan mas (Tabel 10). Kelima komoditas ini dinilai sebagai penyumbang utama protein untuk gizi masyarakat. Susu yang menempati peringkat pertama merupakan komoditas esensial dalam pemenuhan protein masyarakat. Daging sapi menempati urutan ke tiga, dibawah ikan kembung segar. Posisi ikan kembung segar yang lebih tinggi dikarenakan komoditas ini dari segi harga lebih terjangkau, sehingga lebih sering dikonsumsi masyarakat.

Tabel 10. Bobot Hasil Perhitungan AHP

Komoditi	Kriteria						Total
	Karbohidrat	Protein	Vitamin	Pengeluaran	Frekuensi	Produksi	
Beras	0,012	0,007	0,007	0,014	0,009	0,007	0,057
Terigu	0,012	0,007	0,006	0,013	0,007	0,005	0,050
Minyak Goreng	0,011	0,006	0,006	0,013	0,008	0,007	0,051
Tahu & Tempe	0,010	0,009	0,008	0,012	0,008	0,006	0,053
Telur Ayam Ras	0,010	0,009	0,008	0,012	0,008	0,007	0,055
Gula Pasir	0,011	0,006	0,006	0,013	0,009	0,006	0,050
Daging Ayam Ras	0,011	0,009	0,008	0,012	0,008	0,007	0,054
Susu	0,011	0,010	0,009	0,011	0,006	0,005	0,052
Cabe Merah & Rawit	0,008	0,007	0,008	0,011	0,008	0,007	0,048
Bawang Merah	0,008	0,006	0,007	0,011	0,009	0,007	0,047
Jeruk	0,007	0,006	0,008	0,009	0,007	0,006	0,043
Tongkol/ Tuna/ Cakalang Segar	0,009	0,009	0,007	0,010	0,007	0,007	0,049
Daging Sapi	0,010	0,010	0,007	0,009	0,007	0,006	0,049
Ikan Kembung Segar	0,009	0,010	0,007	0,010	0,008	0,007	0,051
Teri Diawetkan	0,009	0,008	0,008	0,010	0,008	0,007	0,050
Ikan Mujair	0,009	0,010	0,007	0,010	0,007	0,007	0,049
Ikan Bandeng Segar	0,009	0,009	0,008	0,010	0,007	0,007	0,050
Bawang Putih	0,008	0,007	0,006	0,010	0,009	0,005	0,045
Kelapa	0,010	0,007	0,006	0,009	0,008	0,007	0,047
Ikan Mas	0,009	0,010	0,008	0,009	0,008	0,007	0,049

Sumber: Hasil Olahan (2013)

Dengan menggunakan pangsa pengeluaran rumah tangga sebagai kriteria, maka beras menempati peringkat pertama dengan nilai 0,014 (Tabel 10). Secara nasional, pangsa pengeluaran rumah tangga (RT) untuk beras adalah 16,88% dari pengeluaran pangan, sementara di pedesaan dan perkotaan masing-masing 13,33% dan 21,36%. Dengan bobot sekitar 0,013, secara berurutan minyak goreng, gula pasir dan terigu masing-masing menempati urutan ke dua, tiga, dan empat. Ketiga komoditas ini merupakan kelompok urutan ke dua dalam pengeluaran RT. Berdasarkan data SUSENAS 2009-2011, pangsa pengeluaran ketiga komoditas tersebut berkisar antara 5,63% - 2,30% (BPS, 2011).

Berdasarkan kriteria frekuensi dikonsumsi suatu komoditas tersebut oleh rumah tangga, dengan bobot sekitar 0,009, beras, bawang putih, bawang merah, dan gula pasir adalah kelompok pertama dengan peringkat tertinggi (Tabel 10). Keempat komoditas ini hampir setiap hari dikonsumsi oleh rumah tangga. Kelompok kedua dengan bobot 0,008 ditempati oleh sembilan komoditas dari tahu dan tempe sampai dengan ikan mas. Kalau dinilai berdasarkan patokan sepuluh besar, maka yang masuk adalah tahu dan tempe, cabe merah dan rawit, minyak goreng, telur ayam ras, kelapa, dan daging ayam ras. Daging sapi dan susu yang menjadi sumber utama protein justru menempati peringkat dua terbawah. Hal

ini mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan kebanyakan masyarakat untuk membeli komoditas tersebut.

Dengan menggunakan kriteria kontribusi terhadap vitamin dan mineral, maka susu menempati peringkat pertama dengan bobot 0,009 (Tabel 10). Susu tidak hanya sebagai sumber utama protein, juga memberi kontribusi besar terhadap vitamin dan mineral. Kelompok kedua dengan bobot 0,008 ditempati delapan komoditas, dari telur ayam ras sampai dengan ikan mas. Ikan kembung segar dengan bobot 0,007 menempati urutan kesepuluh, sementara daging sapi dengan bobot yang sama menempati urutan ke sebelas.

Kriteria pangsa produksi terhadap konsumsi yang mencerminkan tingkat ketergantungan terhadap pasar internasional, ternyata tidak terlalu signifikan dalam menentukan urutan komoditas. Hal ini terlihat dari bobot yang hampir sama untuk sepuluh komoditas dengan bobot tertinggi. Seperti terlihat pada Tabel 10, ada tiga belas komoditas dengan bobot yang hampir sama yaitu 0,007.

Sintesis Penilaian

Berdasarkan bobot hasil perhitungan AHP pada Tabel 10, maka disusun peringkat dari setiap komoditi seperti yang diperlihatkan pada Tabel 11. Beras menempati peringkat tertinggi sebagai Bapok (Tabel 11). Beras menempati peringkat pertama untuk empat kriteria yaitu kriteria pangsa pengeluaran rumah

tangga, karbohidrat, frekuensi konsumsi, dan produksi dalam negeri yang sudah mendekati swasembada. Telur ayam ras menduduki peringkat kedua yang didukung oleh penilaiannya yang sangat

baik untuk vitamin (peringkat dua) dan produksi dalam negeri (peringkat dua). Untuk kriteria lain, nilai telur ayam ras relatif moderat dengan kisaran peringkat antara 5-8.

Tabel 11. Kompilasi Peringkat Komoditi

Komoditi	Karbohidrat	Protein	Vitamin	Pengeluaran	Frekuensi	Produksi	Total
Beras	1	12	15	1	1	1	1
Telur Ayam Ras	8	8	2	5	8	2	2
Daging Ayam Ras	6	7	5	7	10	10	3
Kedelai (Tahu & Tempe)	10	9	8	6	5	15	4
Susu	3	1	1	10	20	18	5
Ikan Kembung Segar	11	2	10	11	11	6	6
Minyak Goreng	5	18	19	2	7	12	7
Terigu	2	13	18	4	15	20	8
Ikan Bandeng Segar	14	6	7	16	16	8	9
Teri Diawetkan	12	11	4	13	12	4	10
Gula Pasir	4	20	20	3	4	16	11
Ikan Mas	16	5	9	20	13	9	12
Ikan Mujair	15	4	13	15	14	5	13
Tongkol/ Tuna/ Cakalang Segar	13	10	12	12	17	7	14
Daging Sapi	7	3	11	17	19	17	15
Cabe Merah & Rawit	17	16	6	9	6	11	16
Kelapa	9	14	17	19	9	3	17
Bawang Merah	19	17	14	8	3	13	18
Bawang Putih	18	15	16	14	2	19	19
Jeruk	20	19	3	18	18	14	20

Sumber: Hasil Olahan (2013)

Daging ayam ras menduduki peringkat ke tiga yang didukung oleh nilai yang baik untuk vitamin, moderat untuk kriteria lainnya. Selanjutnya, posisi ke empat diduduki oleh kedelai (tahu dan tempe) yang didukung nilai yang baik untuk kriteria frekuensi dan pengeluaran, moderat untuk kriteria yang lain. Peringkat ke lima ditempati oleh susu, didukung oleh hasil penilaian yang baik untuk protein (peringkat satu), vitamin (peringkat satu), dan karbohidrat (peringkat tiga), namun sangat rendah untuk kriteria produksi (delapan belas) dan frekuensi

dengan peringkat terendah (dua puluh).

Gula pasir yang biasa masuk Bapok ternyata menempati peringkat ke sebelas walau nilainya hampir sama dengan teri yang diawetkan. Gula pasir mendapat nilai yang cukup baik untuk pangsa pengeluaran rumah tangga, frekuensi, dan karbohidrat, namun mendapat nilai sangat rendah untuk protein dan vitamin (peringkat dua puluh). Selanjutnya, daging sapi yang biasanya masuk Bapok hanya menempati peringkat lima belas, karena peringkatnya umumnya rendah, selain

untuk kriteria protein. Demikian juga cabe, bawang merah, dan bawang putih, peringkatnya relatif rendah karena mendapat penilaian relatif rendah, kecuali kriteria frekuensi.

Sintesa Prioritas Bapok

Berdasarkan hasil analisis, komoditas yang secara konsisten berada di peringkat atas yaitu beras, telur ayam ras, kedelai (tahu dan tempe), daging ayam ras, ikan kembung segar, susu minyak goreng terigu, ikan bandeng segar, dan gula pasir. Jika dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep-28/M.EKON/05/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok maka komoditi yang konsisten sebagai Bapok sesuai dengan hasil analisis adalah beras, gula, minyak goreng, terigu, kedelai, daging ayam, dan telur ayam.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti peringkat, kecenderungan perkiraan konsumsi pada masa mendatang, serta kemudahan untuk melakukan intervensi serta kebijakan sebelumnya, maka ada beberapa komoditas yang potensial untuk diusulkan sebagai bahan pangan pokok. Komoditas yang dapat diusulkan berdasarkan kriteria tersebut diatas adalah beras, telur ayam ras, kedelai (tahu dan tempe), daging ayam ras, ikan kembung segar, susu, minyak goreng, terigu, ikan bandeng segar, dan gula pasir.

Beberapa komoditas yang sering menjadi isu hangat di masyarakat dan

pemerintah kerap harus melakukan intervensi seperti daging sapi, cabe, bawang merah, dan bawang putih, ternyata tidak termasuk calon Bapok berdasarkan enam kriteria yang ditetapkan. Hal ini bermakna bahwa bahwa jika kita menggunakan kriteria yang objektif sesuai dengan UU Pangan, pemerintah tidak perlu merespon terlalu berlebihan terhadap isu-isu untuk komoditas yang ternyata bukan merupakan pangan pokok yang dikonsumsi luas oleh masyarakat. Pemerintah perlu melakukan edukasi pada berbagai pihak, khususnya, media massa dan juga pemerintah daerah tentang apa yang dimaksud dengan Bapok sesuai UU Pangan sehingga media tidak terlalu banyak memuat isu yang secara objektif sebenarnya bukan Bapok.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Enam kriteria untuk menentukan suatu komoditas sebagai Bapok dengan menggunakan esensi pengertian pangan pokok dari Undang-Undang (UU) Pangan No. 18/2012 adalah (1) pangsa pengeluaran dalam pengeluaran pangan rumah tangga; (2) kontribusi terhadap karbohidrat; (3) konsumsi terhadap protein; (4) frekuensi konsumsi; (5) kontribusi terhadap vitamin dan mineral; serta (6) pangsa produksi domestik terhadap konsumsi (tingkat swasembada).

Berdasarkan kriteria tersebut, calon Bapok dan peringkatnya adalah

(1) beras, (2) telur ayam ras, (3) tahu dan tempe, (4) daging ayam ras, (5) ikan kembung segar, (6) ikan bandeng segar (7) gula pasir, (8) susu; (9) minyak goreng, dan (10) terigu. Beberapa komoditas yang sering menjadi isu hangat seperti daging sapi, cabe, bawang merah, bawang putih, ternyata tidak termasuk calon Bapok dengan menggunakan enam kriteria tersebut.

Hasil peringkat komoditas sebagai calon Bapok ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan daftar komoditas Bapok. Agar kebijakan Bapok dapat berjalan secara efektif, pemerintah perlu membatasi jumlah Bapok yang menjadi perhatian utama dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kebijakan pembangunan pertanian, tingkat kesulitan dan biaya dalam pelaksanaan kebijakan pangan/intervensi, dinamika konsumsi dan dinamika pasar internasional. Jika jumlah dan jenis Bapok sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan terutama yang berkaitan dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas/keamanan pangan.

Daging sapi, cabe, bawang merah, dan bawang putih yang sering menyita perhatian pemerintah dan media masa ternyata berdasarkan hasil analisis tidak termasuk dalam sepuluh besar calon Bapok. Untuk itu, edukasi atau sosialisasi tentang Bapok khususnya pada media masa dan pemerintah daerah, perlu terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. (2010). Analisis Konsumsi Pangan Tingkat Masyarakat Mendukung Pencapaian Diversifikasi Pangan. *Gizi Indonesia* 2010, 33(1):20-28.
- Bayazit, O. dan B. Karpak. (2005). *An AHP Application in Vendor Selection*. Departement of Business Administration, College of Business, Washington.
- Bourgeois, R. (2005). *Analytical Hierarchy Process: an Overview*. UNCAPSA-UNESCAP, Bogor.
- BPS. (2011). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2011*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. (2012). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2012*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. (2013). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2011*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Cornescu, V. and and C.R Adam. (2013). The Consumer Resistance Behaviour towards Innovation. *Procedia Economic and Finance* Volume 6 (2013) Page 457-465.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag). (1998). Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 115/MPP/KEP/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat. Diunduh tanggal 16 Januari 2013 dari <http://www.kemenperin.go.id/>
- Encyclopaedia Britannica. (2013). The Definition of food <http://global.britannica.com/search?query=food>
- FAO. (2010). Agriculture and Consumer Protection. "Dimensions of Need - Staple Foods: What Do People Eat?". Diunduh tanggal 20 Februari 2013 dari <http://www.fao.org/>
- Hidayah, N. (2011). Kesiapan Psikologis Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Menghadapi Diversifikasi Pangan Pokok. *Jurnal Humanitas* Vol. Viii No.1 Januari 2011.

- Kementerian Perdagangan (2010). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 03/M-DAG/PER/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014. Diunduh tanggal 13 Februari 2014 dari <http://www.kemendag.go.id/id/news/2010/04/12/peraturan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-03m-dagper12010-tentang-rencana-strategis-kem.>
- Kementerian Pertanian. (2010). Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan 2010-2014. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. (2013). Basis Data Pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Menko Perekonomian. (2010). Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep-28/M.EKON/05/2010 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok. Diunduh tanggal 21 Februari 2013 dari <http://www.setneg.go.id/>
- Meziani, A.S. and F. Rezvani. (1990). Using The Analytical Hierarchy Process to Select a Financing Instrument for a Foreign Investment. *Mathl Comput Modelling Journal*. Volume 13, No. , page 77-82, 1990.
- Murda, H. (2009). Dampak Kenaikan Harga Raskin Terhadap Kesejahteraan dan Konsumsi Gizi Rumah Tangga Miskin di Indonesia. Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Nurkhayani, E. (2009). Analisis permintaan Pangan dan Gizi di Indonesia. Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Permadi, B. (1992). AHP. Pusat Antar Universitas, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saliem, H.P., M. Ariani, Y. Marisa dan T.B. Purwantini. (2002). Analisis Kerawanan Pangan Wilayah Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Setneg Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Diunduh tanggal 21 Februari 2013 dari <http://www.setneg.go.id/>
- Setneg Republik Indonesia. (1996). Undang Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Diunduh tanggal 21 Februari 2013 dari <http://www.setneg.go.id/>
- Setneg Republik Indonesia. (1996). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Diunduh tanggal dari <http://www.setneg.go.id/>
- Spiertz, J.H.J and F. Ewert. (2009). Crop Production and resource use to meet the growing demand for food, feed and fuel: Opportunities and constraints. *NJAS Wageningen Journal of Life Science*. NJAS 56-4, 2009.
- Stillman, A. and D. Thomas. (2008). Nutritional Status during an Economic Crisis: Evidence from Russia. *The Economic Journal*, Volume 118, No. 531 (Aug., 2008), Page 1385-1417.
- Teknomo, K., H. Siswanto, dan S.A. Yudhanto. (1999). Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Proses dalam Menganalisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Mode Transportasi ke Kampus. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Yuliana, R. (2008). Evaluasi Perubahan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Sebagai dampak Kenaikan Harga BBM di Indonesia, Periode Februari 2005 – Maret 2006. Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi. Universitas Indonesia.